

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMERIKSAAN
EKSTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

OCTAFIANI
2009/94086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemeriksaan Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

Nama : Octafiani

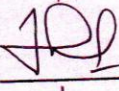
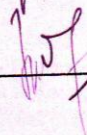
BP/NIM : 2009/94086

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, 26 Juni 2012

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Charoline Cheisviyanni, SE, M. Ak	1. 
2.	Sekretaris	Henri Agustin, SE, M. Si, Ak	2. 
3.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M. Si	3. 
4.	Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	4. 

ABSTRAK

Octafiani. 94086. Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemeriksaan Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

II : Charoline Cheisviyani, SE, M, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Pengaruh pemeriksaan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 15.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,975 > 1,6646$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_1 diterima). (2) pemeriksaan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,236 > 1,6646$ dan nilai signifikansi $0,028 < 0,05$ (H_2 diterima).

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian. (2) Untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain. (3) Prosedur atau peraturan yang berlaku di Kota Padang hendaknya lebih bersifat fleksibel, tidak kaku, dan dapat dijalankan dalam berbagai macam kondisi yang terjadi dilapangan. (4) Disarankan kepada Kota Padang agar yang menjabat sebagai kepala dan staf bagian keuangan dari masing-masing SKPD yang ada di Kota Padang adalah orang yang benar-benar mengerti, mengetahui, dan paham tentang laporan keuangan SKPD.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemeriksaan Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE.M.Si. Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Charoline Cheisviyanni, SE.M.Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi
5. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, perhatian dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini
6. Teman-teman Fakultas Ekonomi angkatan 2009 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang. Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	13
1. Laporan Keuangan	13
a. Pengertian Laporan Keuangan	13
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	14
c. Komponen Laporan Keuangan	17
d. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan.....	17
2. Pengendalian Internal.....	21
a. Pengertian Pengendalian Internal.....	22
b. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang	

Sistem Pengendalian Internal	23
c. Unsur Pengendalian Intern	25
3. Pemeriksaan (<i>audit</i>) Eksternal	30
a. Pengertian Pemeriksaan (<i>audit</i>)	30
b. Undang-undang dan Peraturan yang Mengatur tentang Pemeriksaan.....	31
c. Tujuan Pelaksanaan Audit	32
d. Jenis-jenis Audit.....	33
B. Penelitian Relevan.....	35
C. Pengembangan Hipotesis	37
D. Kerangka Konseptual	39

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Jenis Data dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Variabel Penelitian	45
1. Variabel Independen (X_1 dan X_2)	45
2. Variabel Dependen (Y)	46
F. Pengukuran Variabel	46
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	48
1. Uji Validitas	48
2. Uji Reliabilitas	49

H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	50
I. Uji Asumsi Klasik.....	51
1. Uji Normalitas.....	51
2. Uji Multikolinearitas	51
3. Uji Heterokedastisitas	52
J. Teknik Analisis Data.....	52
1. Analisis Deskriptif	52
2. Metode Analisis	54
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	54
b. Analisis Regresi Berganda	54
c. Uji F (F-test).....	55
3. Uji Hipotesis (t-test).....	55
K. Definisi Operasional.....	56
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Demografi Responden.....	59
C. Uji Validitas dan Reliabilitas	62
1. Uji Reliabilitas.....	62
2. Uji Validitas	63
D. Deskripsi Variabel Penelitian.....	64
E. Uji Asumsi Klasik	68
1. Uji Normalitas	68
2. Uji Multikolinearitas	69

3. Uji Heterokedastisitas.....	70
F. Analisis Model	71
1. Uji Koefisien Determinasi.....	71
2. Analisis Regresi Berganda	71
3. Uji F (F-test).....	72
G. Uji Hipotesis (t-test)	73
H. Pembahasan	75
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian	77
C. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Satuan Kerja perangkat Daerah Kota Padang	44
2. Skala Pengukuran.....	46
3. Kisi-kisi Kuesioner	47
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	51
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner	59
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan	60
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	61
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	61
10. Nilai <i>Cronbach' Alpha</i>	62
11. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	63
12. Tingkat Capaian Responden Kualitas Laporan Keuangan	64
13. Tingkat Capaian Responden Pengendalian Internal	66
14. Tingkat Capaian Responden Pemeriksaan Eksternal.....	67
15. Uji Normalitas Data	69
16. Uji Multikolinearitas	69
17. Uji Heterokedastisitas	70
18. Uji Koefisien Determinasi	71
19. Koefisien Regresi Berganda.....	72
20. Uji F Statsitik	73

DAFTAR GAMBAR

Lampiran	Halaman
1. Kerangka Konseptual	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner.....	81
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	86
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	89
4. Uji Asumsi Klasik	92
5. Uji Model	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan dari reformasi keuangan daerah.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing – masing.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya otonomi daerah, memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, akan tetapi selain mempunyai kewenangan

pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya tersebut.

Agar pengelolaan keuangan pemerintah berjalan dengan baik harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1, menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Suwardjono (2005) tujuan utama dalam laporan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana keorganisasi tersebut. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus mempunyai nilai agar dimanfaatkan oleh pemakai laporan keuangan. Nilai informasi laporan keuangan merupakan kebermanfaatan informasi dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengukur nilai informasi dalam laporan keuangan maka dibutuhkan suatu bentuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran–ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam akuntansi sehingga

dapat memenuhi tujuan dari pelaporan keuangan. Pemenuhan tujuan laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understanability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Karakteristik pertama, dapat dipahami yaitu dimana informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, karakteristik kedua yaitu relevan sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik yang ketiga yaitu keandalan mengandung arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat menyajikan informasi kepada pengguna secara jujur. Karakteristik keempat dapat dibandingkan, mengandung arti bahwa pemakai laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode. Dengan adanya karakteristik kualitatif ini maka diharapkan akan tercapainya penyajian informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemiliknya.

Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Kriteria nilai informasi yang dapat dipahami adalah akurat dan andal. Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian/*control*. Kemampuan pengendalian/ kontrol akan menjaga sistem informasi dari

kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang sistem informasi menghasilkan informasi yang bernilai (keterpahaman). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria nilai informasi dapat dipahami/ keterpahaman tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan pengendalian yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi kemajuan kegiatan kedepan terutama bagian keuangan yang rentan penyelewengan dana. Pemisahaan dalam hal pembukuan bagian keuangan adalah salah satu bentuk sistem pengendalian internal, sehingga tidak mengalir dana negara kerekening pihak tertentu. Sistem pengendalian internal harus diterapkan untuk setiap program kegiatan fungsi entitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang termasuk dalam APBN/ APBD.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yaitu, 1) terkait dengan catatan keuangan, 2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, 3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan asset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan uang negara. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik juga tidak luput dari tudingan tersebut. Pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan masyarakat pada pemerintah haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, bahwa pemerintah telah mengelola sumber daya yang dipercayakan pada pemerintah dan agar informasi tentang keuangan daerah yang disajikan tidak menyesatkan para pemakainya, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah tersebut. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor independen untuk memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) bahwa laporan keuangan yang dibuat telah bebas dari salah saji yang material dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan (Mardiasmo, 2004). Pemeriksaan akuntansi dari sebuah laporan keuangan jika ditinjau dari akuntan publik merupakan pemeriksaan secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau unit organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar atau tidak keadaan keuangan perusahaan atau pemerintah.

Pemeriksaan keuangan daerah dapat dibedakan atas dua yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. Pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan inspektorat daerah. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah, inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program – program pemerintah. Dari segi fungsi – fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program–program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program–program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan pemeriksaan eksternal, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dalam lingkup kenegaraan/ kedaerahan, dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus mengacu pada sejumlah kaidah professional tertentu yang berlaku bagi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, selain itu lembaga pemeriksa keuangan eksternal juga harus mengacu pada sejumlah kaidah pemberian pendapat tertentu yang telah diatur pula secara tegas dalam lingkungan profesi pemeriksa keuangan.

Menurut Mulyadi (2002), audit laporan keuangan adalah tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil audit terhadap laporan keuangan tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit yang memuat opini auditor. Arens (2008) menyatakan bahwa para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa laporan audit merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena mengkomunikasikan temuan-temuan audit.

Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) efektifitas sistem pengendalian intern. Jika kriteria tersebut telah terpenuhi dalam penyusunan laporan keuangan maka pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Opini yang diberikan oleh BPK selaku pemeriksa eksternal memberikan keyakinan yang memadai bagi Menteri selaku penanggungjawab penyusunan dan pelaporan keuangan di tingkat Kementerian/ Lembaga telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (www.Bpkp.go.id). Sedangkan Lisa (2010) menyatakan bahwa para pengguna laporan menyalurkan diri pada laporan auditor untuk memperoleh keandalan dari laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah Kota Padang tahun 2010 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masalah asset menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga membuat laporan keuangan Pemerintah Kota Padang mendapat nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Ardi selaku Wakil Ketua Pansus IV DPRD mengatakan bahwa selama ini masih banyak asset Pemko Padang yang berserakan dan tidak terdata dengan baik. Selain itu BPK juga menemukan belanja perjalanan dinas di dua SKPD, yakni Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan (Dispernahutbun) dan Sekretariat DPRD sebesar Rp 120 juta ternyata tidak terdapat dalam daftar penumpang pesawat udara. Sebesar Rp78 juta di Sekretariat DPRD dan Dispernahutbun sebesar Rp 42 juta.

Hal ini menunjukkan indikasi bahwa pengendalian internal Pemerintah Kota Padang masih lemah, karena salah satu tujuan dari pengendalian internal

adalah untuk mengamankan asset negara, sehingga opini atas Laporan Keuangan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Padang dapat tercapai.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan banyak dilakukan pada perusahaan. Diantaranya penelitian Payamta (2006) menguji tentang Studi Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi, dan Opini Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Ayomi (2008) menguji Analisis Manfaat Laporan Pengendalian Intern dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini Ayomi bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh manfaat laporan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara statistik antara laporan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Siska (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi/responden dari penelitian ini adalah auditor BPKP, dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan pemerintah masih lemah sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi sangat lemah.

Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat banyak keragaman hasil yang ditemukan dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya keragaman hasil tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang pada

variabel kualitas laporan keuangan. Adapun beda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam hal pengukuran variabel, sampel yang diambil dan tempat penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Padang. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Padang, dimana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Sejauhmana pemeriksaan eksternal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang
2. Pengaruh pemeriksaan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan diharapkan dapat mengimplementasikan teori – teori yang telah didapat selama masa perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan pertimbangan atau perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan informasi tambahan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pemerintahan

Memberi masukan terhadap pemerintahan agar lebih meningkatkan pengendalian internal dan pemeriksaan eksternal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.